

DESENTRALISASI FISKAL, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA¹

FISCAL DECENTRALISATION, ECONOMICS GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SUMATERA

Jul Fahmi Salim², Citra Permatasari, Ira Yulita, Ade Riandar Putra

Email : julfahmi25@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of fiscal decentralization and economic growth on human development on Sumatra. The data used are regional tax data that represent fiscal decentralization, economic growth and human development index. The data used in the form of panel data of each province from 2010 to 2016. To test its influence used panel data regression model, after the best model test is a fixed effect model. The results of this study indicate that fiscal decentralization in this case local taxes have a positive and significant influence on human development on Sumatra, while economic growth has a negative but not significant effect on human development on the island of Sumatera

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Sumatera. Data yang digunakan adalah data pajak daerah yang mewakili desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Data yang digunakan berbentuk data panel masing-masing provinsi dari tahun 2010 hingga 2016. Untuk menguji pengaruhnya digunakan model regresi data panel, setelah dilakukan pengujian maka diperoleh model terbaik yaitu *fixed effect model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dalam hal ini pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia Sumatera, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Pulau Sumatera.

¹ Diterima 21 September 2018. Direvisi 9 November 2018

² CPNS PKP2A IV Lembaga Administrasi Negara , Aceh Besar

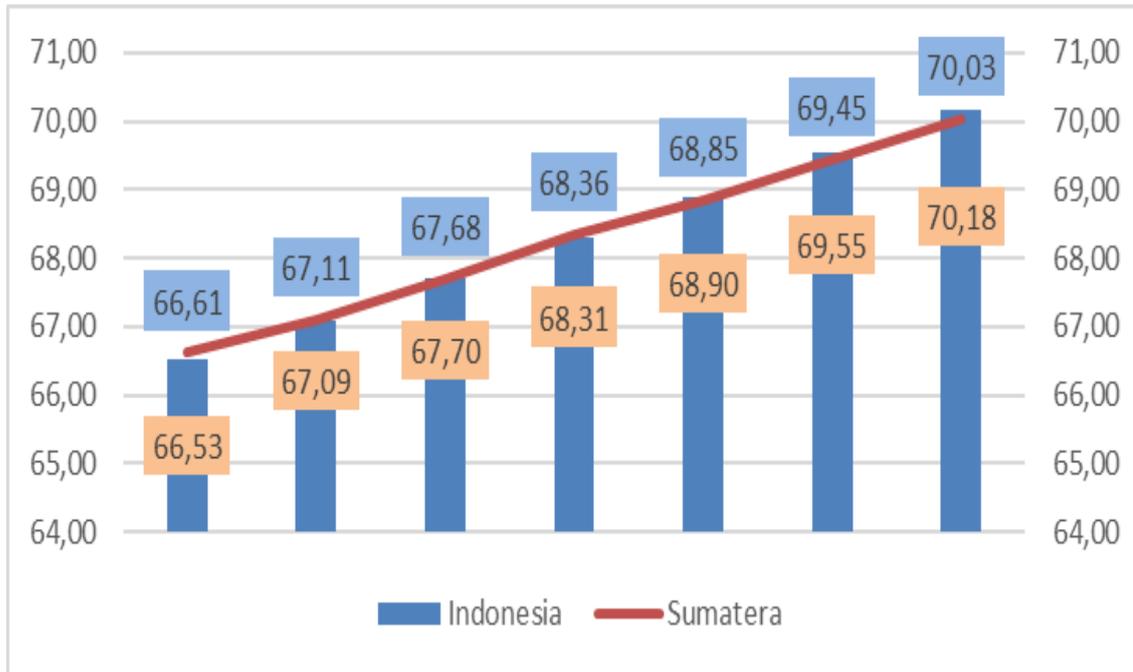
A. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dahulu kemajuan suatu wilayah atau negara masih banyak menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilan suatu negara. Namun dalam beberapa waktu belakangan, keberhasilan suatu negara lebih diukur dari menggunakan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia lebih tajam dalam menjelaskan pembangunan manusia karena melalui tiga dimensi yaitu pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Seringkali kemiskinan, pendidikan yang rendah serta tingkat pendapatan yang kecil suatu negara disalahkan karena kurang tepat sasarannya kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat. Padahal kita mengetahui permasalahan suatu daerah lebih diketahui oleh daerah itu sendiri, sehingga mereka lebih tahu untuk berbuat apa dalam upaya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan

adalah dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dengan desentralisasi.

Kegiatan perekonomian Indonesia memasuki babak baru semenjak diterbitkannya UU 22 dan 25 tahun 1999 mengenai desentralisasi dan perimbangan keuangan daerah. Dalam undang-undang ini dijabarkan mengenai pembagian peran pemerintah pusat dan daerah baik dalam hal administratif maupun dalam pengelolaan keuangan. Latar belakang lahirnya undang-undang mengenai desentralisasi fiskal ini adalah anggapan bahwa pemerintah pusat sebagai pengelolaan keuangan secara terpusat kurang tepat (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 1999). Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa permasalahan suatu daerah lebih dipahami oleh daerah tersebut dibandingkan dengan pemerintah pusat (UNDP, 2005). Desentralisasi fiskal memegang peranan penting dalam maju atau tertinggalnya suatu daerah, tergantung kemampuan daerah tersebut dalam menjalankannya, dengan kata lain desentralisasi akan berdampak baik jika di jalankan dengan benar namun tidak menutup kemungkinan akan berakibat negatif jika tidak tepat dalam pelaksanaannya (Song, 2013).

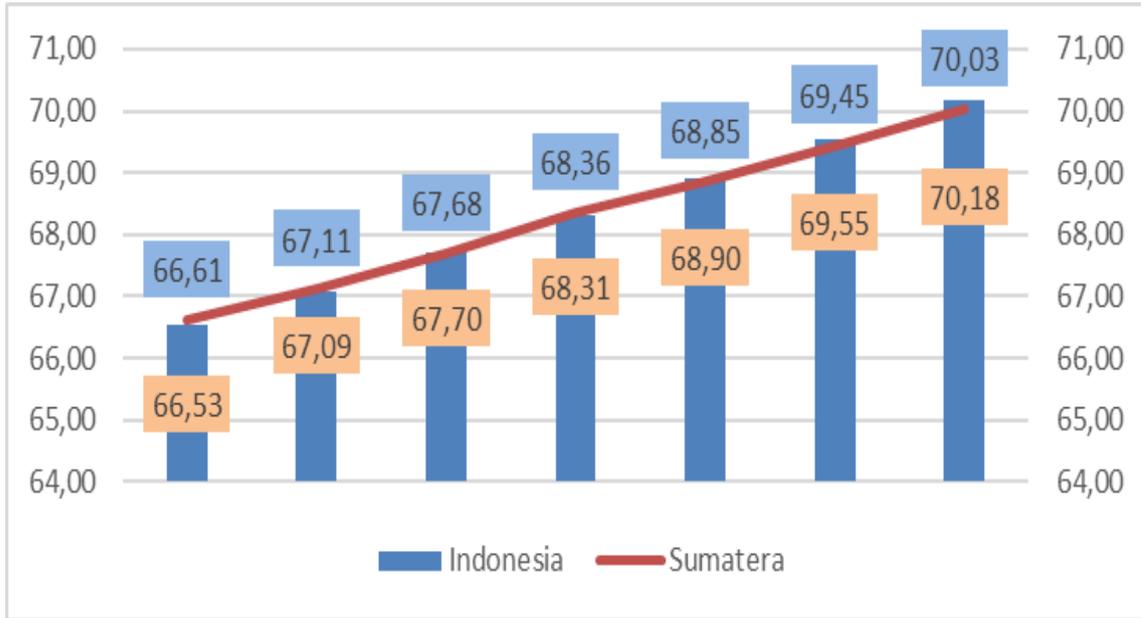


Gambar 1 : Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010-2016

Sumber : ipm.bps.go.id (2018)

Diharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal akan mengakibatkan pemerataan pembangunan dan lebih tepat sasaran. Di India dampak dari desentralisasi fiskal sudah terasa dengan semakin meratanya pembangunan infrastruktur sosial dan pembangunan pedesaan (Kalirajan and Otsuka, 2012). Setelah adanya desentralisasi fiskal, daerah yang terdahulunya tertinggal dan minim infrastruktur mulai investasi besar-besaran di bidang infrastruktur dan menunjukkan perkembangan yang baik (Kis-Katos and Sjahrir, 2017).

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 7 tahun terakhir indeks pembangunan manusia di Indonesia cenderung meningkat. Dalam undang-undang yang disahkan mengenai pemerintahan daerah dan keuangan daerah mengatur sampai tingkat pajak daerah. Peran pajak daerah yang penting dalam proses pembangunan suatu daerah terutama daerah tertinggal (Mosley, 2015). Desentralisasi fiskal juga mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap lingkungan bisnis terutama di negara-negara berpendapatan rendah atau negara sedang berkembang (Escaleras and Chiang, 2017).



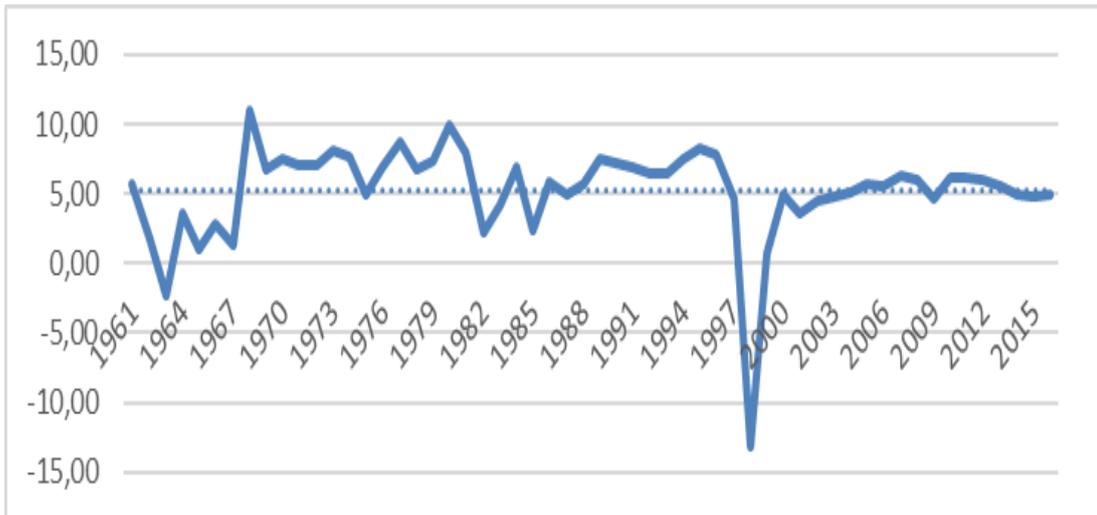
Gambar 2 : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2016

Sumber : ipm.bps.go.id (2018)

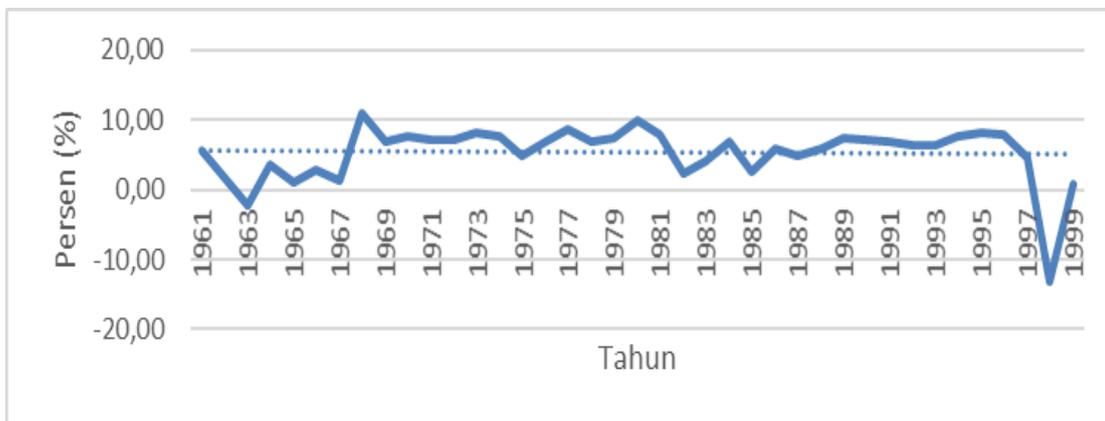
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua daerah maupun negara berhasil dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut, karena desentralisasi fiskal juga dapat mengakibatkan memburuknya distribusi pendapatan dan distribusi kesejahteraan (Aslim and Neyapti, 2017). Selain itu dampak buruk dari desentralisasi itu sendiri adalah semakin maraknya korupsi, negara dengan daerah yang memiliki ukuran desentralisasi semakin besar akan mengakibatkan korupsi semakin tinggi pula (Lecuna, 2012). Selain itu efek negatif dari desentralisasi adalah penggunaan lahan secara ilegal juga meningkat dan meningkat konflik di daerah desentralisasi tersebut (Wu and Heerink, 2016). Meski dalam

beberapa penelitian terdahulu desentralisasi memiliki peran yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dalam beberapa kasus pengeluaran pemerintah pada negara kelas menengah ke bawah, pengeluaran pemerintah tidak memiliki peran yang penting dalam penurunan angka kemiskinan (Anderson et al., 2018).

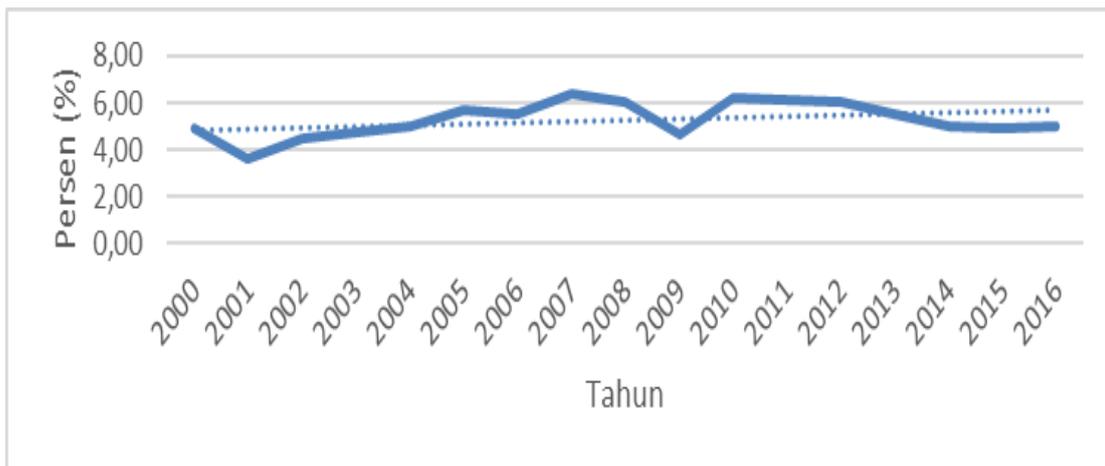
Dalam kurun waktu 55 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung fluktuatif namun tetap mengalami tren yang meningkat (Gambar 3). Pada masa itu, sistem keuangan di Indonesia masih bersifat sentral, dimana pemerintah pusat mengendalikan secara keseluruhan mengenai keuangan daerah.



Gambar 3 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1961 - 2016
Sumber : Bank Dunia (2018)



Gambar 4 : Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Desentralisasi Fiskal
Sumber : Bank Dunia (2018)



Gambar 5 : Pertumbuhan Ekonomi Sesudah Desentralisasi Fiskal
Sumber : Bank Dunia (2018)

Desentralisasi fiskal yang tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang memadai akan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya daerah yang bergantung pada pemerintah pusat mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan (Yushkov, 2014).

Desentralisasi fiskal dalam tujuannya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dapat menyebabkan masalah yang serius terhadap lingkungan jika tidak diimbangi dengan pertimbangan daerah tertentu yang akan menyebabkan meningkatnya emisi karbon akibat kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan (Zhang et al., 2017). Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam 38 tahun terakhir banyak berpendapat bahwa itu merupakan pertumbuhan ekonomi yang semu, dimana di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan cenderung miskin dan tertinggal baik dari segi pembangunan maupun sumber daya manusianya.

Meskipun sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan meningkat, namun untuk rata-rata peningkatannya sebelum desentralisasi fiskal berada pada kisaran 3.03 persen, setelah adanya desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi rata-rata menjadi 3.66 persen. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal akan meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tentu saja

pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan dari desentralisasi fiskal, karena pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh bagian luarnya saja.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal serta pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal serta pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera.

Tinjauan Pustaka

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi (UU Republik Indonesia No 32, 2004). Sedangkan desentralisasi fiskal adalah transfer tanggungjawab dan kewenangan untuk penerimaan dan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta memberikan mereka kekuatan untuk membuat keputusan (Bahl, 1999).

Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan nasional (Boediono, 1999). Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah (Sukirno, 2011). Selain itu pertumbuhan ekonomi menunjukkan

sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Mankiw et al., 2013). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan pendapatan di negara maju, seperti perkembangan, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan ekonomi dalam jangka panjang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya (Badan Pusat Statistik, 2018)

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (DPR RI, 2009)

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM dengan menggunakan model ECM menemukan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Dummy desentralisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan PPN dan Dummy krisis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM (Setiawan and Hakim, 2008). Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi-provinsi di Indonesia dengan menggunakan model kointegrasi

menemukan bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dalam jangka panjang memiliki hubungan yang kuat (Lumbantoruan and Hidayat, 2013). Selain itu di China, desentralisasi fiskal direspon secara berbeda oleh berbagai daerah, daerah berkembang atau tertinggal cenderung merasakan dampak negatif dari adanya desentralisasi fiskal tersebut, sebaliknya daerah yang maju cenderung kurang merespon adanya desentralisasi fiskal tersebut (Yang, 2016).

Konsumsi energi di Pakistan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pakistan (Wang et al., 2018). Desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang berdampak positif terhadap pembangunan manusia (Soejoto and Subroto, 2015). Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Yuliani and Saragih, 2014).

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Pulau Sumatera digunakan pendekatan regresi linear. Diasumsikan bahwa

pembangunan manusia merupakan fungsi dari desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, maka model penelitiannya sebagai berikut :

$$PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 LPD_{it} + e_{it}$$

dimana :

PM : Pembangunan Manusia

PE : Pertumbuhan Ekonomi

LPD : Pajak Daerah dalam bentuk Logaritma

e : *Error term*

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PM yang menggambarkan pembangunan manusia. Variabel ini diukur dengan menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. PE adalah variabel pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi yang ada di pulau Sumatera sedangkan LPD merupakan variabel desentralisasi fiskal yang digunakan adalah data pajak daerah

masing-masing provinsi di pulau Sumatera yang di transformasi ke dalam bentuk logaritma.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pajak daerah dalam bentuk data panel dari tahun 2011-2016 yang diperoleh dari Bank Indonesia, DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan regresi data panel ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain melakukan pemilihan model terbaik (*common effect model, fixed effect modal dan random effect model*) melalui uji redundan dan uji hausman serta uji *lagrange multiplier*. Selain itu juga diperlukan uji multikolinearitas dan uji normalitas data.

Tabel 1 : Hasil Uji Deskriptif

	IPM	KEMISKINAN	PAJAK DAERAH
Mean	68.58	206.34	1,430,000,000,000
Median	68.33	141.21	1,050,000,000,000
Maximum	73.99	727.76	4,530,000,000,000
Minimum	64.20	18.83	288,000,000,000
Std. Dev.	2.13	186.51	1,100,000,000,000
observations	60	60	60

Sumber : eviews 10 (2018)

Dari hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata IPM di pulau Sumatera sebesar 68,58 dengan median 68.33 serta standar deviasi 2.13. Nilai rata-rata IPM dalam hal ini dapat digunakan sebagai representasi dari

nilai IPM di pulau sumatra. Nilai terendah IPM di pulau Sumatra sebesar 64,20 serta yang tertinggi adalah 73,99. Rata-rata angka kemiskinan di pulau Sumatra adalah 206.34 dengan nilai median 141.21 serta standar deviasi

186.51. Nilai rata-rata angka kemiskinan di pulau Sumatra merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data dalam hal ini data kemiskinan di pulau Sumatra. Begitu pula dengan pajak daerah di pulau Sumatra, rata-rata pajak daerah di pulau Sumatra adalah 1.43 triliun rupiah. Sedangkan angka kemiskinan di pulau Sumatera rata-rata 206 ribu orang, dengan angka terendah sebesar 141 ribu dan yang tertinggi sebesar 727 ribu jiwa. Pajak daerah di pulau Sumatera rata-rata sebesar 1,43 triliun rupiah dengan terendah 288 miliar rupiah sedangkan angka tertinggi sebesar 4,53 Triliun rupiah.

Uji Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dalam model regresi data panel dilakukan dengan melakukan uji redundan, uji hausman serta uji *Lagrange Multiplier* jika diperlukan. Dalam uji redundan dilakukan untuk menentukan model terbaik antara model *common effect* atau model *fixed effect*, sedangkan uji *hausman* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *random effect*, jika hasil tidak konsisten maka akan dilakukan uji lanjutan yaitu uji LM yang digunakan untuk memilih model *common effect* atau model *random effect*.

Tabel 2 : Hasil Uji Redundan (Chow test)

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	105.369082	(9,48)	0.0000
Cross-section Chisquare	181.972153	9	0.0000

Sumber : *evIEWS 10 (2018)*

Uji redundan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai prob *Cross-section Chisquare* sebesar 0,000, artinya *fixed effect model* merupakan model terbaik, sedangkan pada saat uji hausman (Tabel 3) menunjukkan bahwa model terbaik adalah model *fixed*.

Karena hasil uji pertama dan kedua konsisten maka hasil pemilihan menunjukkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model*, sehingga untuk interpretasi hasil penelitian menggunakan *fixed effect model*.

Tabel 3 : Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Breusch-Pagan	11.588105	2	0.0030

Sumber : *evIEWS 10 (2018)*

Hasil estimasi Tabel 4 menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa jika diasumsikan nilai pertumbuhan ekonomi dan pajak daerah konstan maka nilai indeks pembangunan manusia di pulau Sumatera akan mengalami

penurunann sebesar -24.12 poin, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Selanjutnya desentralisasi fiskal dalam hal ini merupakan data pajak daerah berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia.

Dari hasil regresi menunjukkan setiap kenaikan pertumbuhan

ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia di Pulau Sumatera sedangkan setiap kenaikan pajak daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di pulau Sumatera sebesar 3.36 poin dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 4 : Hasil Estimasi Fixed Effect Model

<i>Dependent Variabel : IPM</i>				
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.*</i>
C	-24.12396	12.18815	-1.979296	0.053
PE	-0.137043	0.095247	-1.438815	0.156
LPD	3.369106	0.425998	7.908733	0.000*
R² = 0.9540	N = 60	F-statistic = 76.07		
R² adj = 0.9435	t tabel = 1.671	Prob(F-stat) = 0.00		

*signifikan pada alpha 0.05

Sumber : eviews 10 (2018)

$$PM = -24.123 - 0.137PE + 3.369LPD$$

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pembangunan Manusia

Dalam teorinya pertumbuhan ekonomi akan mendorong semakin baiknya indeks pembangunan manusia. Namun berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tetapi tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di Pulau Sumatera. Hasil ini sesuai dengan yang didapatkan oleh Pertumbuhan ekonomi juga tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Asia (Mustafa, et al., 2017). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia (Wang et al., 2018). Beberapa temuan penelitian

terdahulu juga menemukan hasil ini karena sebagian negara berkembang seperti Indonesia masih belum bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dalam mensejahterakan masyarakat dari lapisan terbawah sehingga mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang semu hanya menyentuh level atas seperti perindustrian sedang dan besar sehingga kue ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi regional tidak serta merta mampu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah (Soejoto and Subroto, 2015).

Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pembangunan Manusia

Desentralisasi fiskal memungkinkan suatu daerah untuk menggunakan keuangannya lebih leluasa namun dalam batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku dan bisa lebih tepat sasaran karena permasalahan daerah itu sendiri lebih diketahui oleh daerah itu sendiri. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di pulau Sumatera. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang didapat oleh (Mehmood, et al., 2010) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal efektif dalam meningkatkan pembangunan manusia di Pakistan. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah yang digunakan oleh daerah itu sendiri lebih mencapai sasaran jika dibandingkan dengan jika pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah pusat, hal ini disebabkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut tentu lebih diketahui oleh daerah itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Indeks pembangunan manusia di pulau Sumatera cenderung berbeda antar provinsi, dimana nilai rata-rata sebesar 70,03 sedikit lebih rendah dari IPM nasional sebesar 70,18. Provinsi dengan nilai IPM terendah adalah Provinsi Lampung sebesar 67,65 sedang Provinsi dengan nilai

IPM tertinggi adalah Provinsi Kep. Riau dengan angka sebesar 73,99.

2. Desentralisasi fiskal dalam hal ini pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia di pulau Sumatera.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pembangunan manusia di pulau Sumatera.

Rekomendasi

Laju Indeks Pembangunan Manusia di pulau Sumatera cukup baik, yaitu berada di kisaran 70,03, meski begitu angka IPM Pulau Sumatera masih sedikit berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu diberikan dorongan untuk meningkatkan angka tersebut. Selain itu yang cukup mengkhawatirkan justru ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia meskipun tidak signifikan. Ini berarti ada yang kurang tepat dengan proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain itu pengaruh negatif dari pertumbuhan ekonomi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan perekonomian yang berjalan selama 6 tahun terakhir masih belum tepat sasaran dimana efek langsung terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat masih belum maksimal, sehingga pemerintah

kedepannya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah harus lebih tepat sasaran dengan cara melibatkan sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sehingga manfaatnya secara langsung dapat dirasakan daerah tersebut.

Kelemahan dan Batasan Penelitian

Terlepas dari hasil penelitian yang diperoleh, penelitian ini masih memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan berupa model yang digunakan kurang dinamis dan rentang data yang masih tergolong sedikit serta jumlah daerah yang masih dalam satu kepulauan. Penelitian akan lebih baik jika menggunakan model yang lebih dinamis seperti Panel Var, menggunakan rentang waktu yang lebih panjang serta dari berbagai pulau besar yang dapat memberikan perbandingan keadaan suatu daerah dengan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E., d'Orey, M.A.J., Duvendack, M. and Esposito, L. (2018), "Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis", *World Development*, available at: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>.
- Aslim, E.G. and Neyapti, B. (2017), "Optimal fiscal decentralization: Redistribution and welfare implications", *Economic Modelling*, Elsevier, Vol. 61 No. November 2016, pp. 224-234.
- Badan Pusat Statistik. (2018), "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017", *Berita Resmi Statistik*, available at: <https://doi.org/4102002>.
- Bahl, R. (1999), "Implementation Rules For Fiscal Decentralization", *Annals of Economics and Finance*.
- Boediono, D.R. (1999), "Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro", *BPFE*.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (1999), *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Local Government*, available at: <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- DPR RI. (2009), *Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah, Undang- Undang*, available at: <https://doi.org/10.1002/app.44622>.
- Escaleras, M. and Chiang, E.P. (2017), "Fiscal decentralization and institutional quality on the business environment", *Economics Letters*, available at: <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.07.019>.
- Kalirajan, K. and Otsuka, K. (2012), "Fiscal Decentralization and Development Outcomes in India: An Exploratory Analysis", *World Development*, available at: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.005>.
- Kis-Katos, K. and Sjahrir, B.S. (2017), "The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia", *Journal of Comparative Economics*, Vol. 45 No. 2, available

- at:<https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>.
- Lecuna, A. (2012), "Corruption and size decentralization", *Journal of Applied Economics*, available at:[https://doi.org/10.1016/S1514-0326\(12\)60007-5](https://doi.org/10.1016/S1514-0326(12)60007-5).
- Lumbantoruan, E.P. and Hidayat, P. (2013), "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di Indonesia (Metode Kointegrasi)", *Ekonomi Dan Keuangan*.
- Mankiw, N.G., Quah, E. and Wilson, P. (2013), "PENGANTAR EKONOMI MAKRO", *PENGANTAR EKONOMI MAKRO*, available at:<https://doi.org/10.3390/bs301001>.
- Mosley, P. (2015), "Fiscal composition and aid effectiveness: A political economy model", *World Development*, available at:<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.020>.
- Setiawan, M.B. and Hakim, A. (2008), "Indeks Pembangunan Manusia", *Jurnal Economia*, available at:<https://doi.org/4102002>.
- Soejoto, A. and Subroto, W.T. (2015), "Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development", *International Journal of Economics and Financial Issues*.
- Song, Y. (2013), "Rising Chinese regional income inequality: The role of fiscal decentralization", *China Economic Review*, available at:<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2013.02.001>.
- Sukirno, S. (2011), *Teori Pengantar Ekonomi Makro, Jakarta*.
- UNDP. (2005), *Annual Report, UNDP 2005*, available at:<https://doi.org/10.1039/C1DT90165F>.
- UU Republik Indonesia No 32. (2004), "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah", *UU No 32 2004*, available at:<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Wang, Z., Danish, Zhang, B. and Wang, B. (2018), "Renewable energy consumption, economic growth and human development index in Pakistan: Evidence form simultaneous equation model", *Journal of Cleaner Production*, available at:<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.260>.
- Wu, Y. and Heerink, N. (2016), "Foreign direct investment, fiscal decentralization and land conflicts in China", *China Economic Review*, Elsevier B.V., Vol. 38, pp. 92-107.
- Yang, Z. (2016), "Tax reform, fiscal decentralization, and regional economic growth: New evidence from China", *Economic Modelling*, Elsevier B.V., Vol. 59, pp. 520-528.
- Yuliani, T. and Saragih, N. (2014), "Determinan pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi jawa tengah", *Jejak ; Journal of Economic and Policy*, available at:<https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3843>.
- Yushkov, A. (2014), *Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth: The Case of the Russian Federation*, SSRN, available at:<https://doi.org/10.2139/ssrn.2518319>.
- Zhang, K., Zhang, Z.Y. and Liang, Q.M.

(2017), "An empirical analysis of the green paradox in China: From the perspective of fiscal decentralization", *Energy Policy*, Elsevier, Vol. 103 No. March 2016, pp. 203-211.